



**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
SEMESTER II  
TA 2023**

**KPU KABUPATEN JOMBANG**  
Jl. KH. Romly Thamim  
Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto  
Kabupaten Jombang

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta memedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jombang, 15 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jombang



**MOGHAMAD ARIFUDDIN**

NIP.19811213 200012 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>1</b>
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional .....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum .....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	19
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	21
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	24
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	25
VI. Lampiran .....	27



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Realisasi Anggaran	4
Tabel 2	Neraca	5
Tabel 3	Laporan Operasional	7
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas	8
Tabel 5	Rincian Pendapatan per 30 September 2023	19
Tabel 6	Rincian Belanja per 30 Desember 2022	20
Tabel 7	Perbandingan Realisasi TA 2023 dan TA 2022	20
Tabel 8	Rincian Belanja Modal per 30 September 2023	21
Tabel 9	Rincian Kas Bendahara Pengeluaran	21
Tabel 10	Rincian Beban Pegawai	25
Tabel 11	Beban Persediaan	25
Tabel 12	Realisasi Beban Barang dan Jasa	26
Tabel 13	Beban Pemeliharaan	26
Tabel 14	Beban Perjalanan Dinas	27
Tabel 15	Beban Penyusutan	27
Tabel 16	Perbandingan Ekuitas	28



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMAD ARIFUDDIN

Jabatan : Sekretaris KPU kabupaten Jombang

Alamat : Jl. KH. Romly Thamim, Desa Sumbermulyo,  
Kecamatan Jogoroto – Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa :

1. Laporan Keuangan Semester II TA 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
2. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.
3. Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang disusun dan disajikan sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
4. Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jombang, 15 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jombang



**MOCHAMAD ARIFUDDIN**

NIP.19811213 200012 1 001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Semester II Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Semester II menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Januari s.d Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 pada KPU Kabupaten Jombang sebesar Rp. 526.340,- yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 526.340,-. Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut merupakan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu atas setoran kelebihan kekurangan gaji pengabdian atas nama alm. Suwanto.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp. 53.998.342.065,- atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 55.835.687.000,-.

### 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 atau Semester II TA 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 32.747.824.005 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 26.806.670.642,- ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 5.941.153.363,- ; dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,-, sehingga Jumlah Aset KPU Kabupaten Jombang pada Semester II TA 2022 yaitu sebesar Rp 32.747.824.005,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 32.747.824.005,-

### **3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Surplus/Defisit dari operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0. Sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp 53.084.314.550,- dan terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (53.084.314.550)

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- dan Surplus/defisit pada Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 526.340,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (53.083.788.210)

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 5.936.657.138,- sedangkan ekuitas pada 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp. 32.747.824.005,- Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah ekuitas di tahun 2023. Jumlah Ekuitas awal tersebut, ditambah jumlah Defisit L-O pada 31 Desember 2023 sebesar Rp (53.083.788.210), koreksi asset non revaluasi sebesar Rp. (3.493.820) dan transaksi antar entitas sebesar Rp. 79.898.448.897,- serta kenaikan ekuitas sebesar Rp. 26.811.166.867

### **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	TA 2023		% REALISASI ANGGARAN	TA 2022
			ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	B.1.1.1	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1.1.2	0	526,340	0	453,786,987
	HIBAH	B.1.2	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>		<b>0</b>	<b>526,340</b>	<b>0</b>	<b>453,786,987</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
	BELANJA PEGAWAI	B.2.1	2,162,877,000	2,152,640,456	100	2,141,679,153
	BELANJA BARANG	B.2.2	53,432,652,000	51,615,556,609	97	2,194,139,695
	BELANJA MODAL	B.2.3	240,158,000	230,145,000	96	147,278,000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>55,835,687,000</b>	<b>53,998,342,065</b>	<b>97</b>	<b>4,483,096,848</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester II TA 2023 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah realisasi pada Semester II TA 2023 yaitu sebesar Rp. 53.998.342.065,- dari total pagu sebesar Rp. 55.835.687.000,- atau dapat dikatakan sebesar 97% dari total pagu yang ada.

Pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat Penerimaan Negara dan Hibah senilai Rp. 526.340,- yang terdiri dari : penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp. 526.340 yang merupakan setoran kelebihan atas kekurangan gaji pengabdian atas nama alm. Suwanto.

## II. NERACA

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas Lainnya dan Setara Kas	24.954.012.060,-	
Persediaan	1.852.658.582,-	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>26.806.670.642,-</b>	<b>0</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	3.027.072.000,-	3.027.072.000,-
Peralatan dan Mesin	3.146.188.676,-	3.012.713.676,-
Gedung dan Bangunan	2.788.819.000,-	2.692.149.000,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.278.000,-	55.278.000,-
Akumulasi Penyusutan	(3.076.204.313,-)	(2.808.549.988,-)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5.941.153.363,-</b>	<b>5.978.662.688,-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Lain-lain	302.427.950,-	302.427.950,-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(302.427.950,-)	(302.427.950,-)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>32.747.824.005,-</b>	<b>5.978.662.688,-</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang kepada Pihak ketiga	0,-	42.005.550,-
Utang Yang belum Ditagihkan	0,-	0
Uang Muka dari KPPN	0,-	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,-</b>	<b>42.005.550,-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,-</b>	<b>42.005.550,-</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	32.747.824.005,-	5.936.657.138,-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>32.747.824.005,-</b>	<b>5.936.657.138,-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>32.747.824.005,-</b>	<b>5.978.662.688,-</b>

Berdasarkan Neraca Semester II TA 2023 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Aset KPU Kabupaten Jombang sebesar Rp. 32.747.824.005,- Dengan rincian Aset Lancar sejumlah Rp. 26.806.670.642,-, Aset Tetap sebesar Rp. 5.941.153.363,- dan Jumlah Aset Lainnya sebesar 0.



Terdapat kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 0,-, utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0,- dan Uang muka dari KPPN sebesar Rp. 0,-. Sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas KPU Kabupaten Jombang pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 32.747.824.005,-

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2,110,634,906	2,183,684,703
Beban Persediaan	D.3	770,000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	48,615,918,766	930,138,171
Beban Pemeliharaan	D.5	545,423,902	452,299,184
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,547,406,471	811,702,340
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	264,160,505	335,459,786
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>53,084,314,550</b>	<b>4,713,284,184</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(53,084,314,550)</b>	<b>(4,713,284,184)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	453,786,987
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		526,340	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(636,015,044)
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>526,340</b>	<b>(636,015,044)</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>526,340</b>	<b>(182,228,057)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(53,083,788,210)</b>	<b>(4,895,512,241)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(53,083,788,210)</b>	<b>(4,895,512,241)</b>

Berdasarkan Laporan Operasional Semester II TA 2023 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Beban pada KPU Kabupaten Jombang sebesar Rp. 53.084.314.550,- sedangkan jumlah keseluruhan Surplus/Defisit LO yaitu sebesar Rp. (53.083.788.210),- Disamping itu, terdapat defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp. 526.340 yang merupakan penyetoran kelebihan atas kekurangan gaji pengabdian atas nama alm. Suwarto.

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta memedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jombang, 15 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jombang



**MOGHAMAD ARIFUDDIN**

NIP.19811213 200012 1 001

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Kabupaten Jombang

*Dasar  
Hukum  
Entitas  
dan  
Rencana  
Strategis*

Laporan keuangan Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan memedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan KH.Romli Thamim, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Selain itu Laporan Keuangan ini juga untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan, seiring usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

## A.2. Pendekapan Penyusunan Laporan Keuangan

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

### *Basis Akuntansi*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan

basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

##### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Tidak ada pendapatan operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup : Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,-, Persediaan sebesar Rp. 1.852.658.582 dan Kas Lainnya setara Kas sebesar Rp. 24.954.012.060 Sehingga jumlah keseluruhan Aset Lancar yaitu sebesar Rp. 24.954.012.060,-
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk Aset berupa Tanah senilai Rp 3.027.072.000
  - b. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.146.188.676
  - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya Rp 2.788.819.000
  - d. Pengeluaran untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang nilainya Rp 55.278.000 yang merupakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
  - e. Akumulasi Penyusutan nilainya (3.076.204.313)
  - f. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklarifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Pada tahun 2023 terdapat utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 0,-, Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0,- dan Uang muka dari KPPN sebesar Rp. 0,-. Sehingga pada Semester II Tahun 2023 terdapat Kewajiban Jangka pendek sebesar Rp. 0,-.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas KPU Kabupaten Jombang di tahun 2023 sebesar Rp. 32.747.824.005,-

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2023 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) dari DIPA awal dan Komisi Pemilihan Umum RI juga sudah melakukan revisi DIPA satker sehingga terdapat perubahan pagu DIPA pada KPU Kabupaten Jombang dari Rp. 34.596.489.000,- menjadi Rp. 55.835.687.000,-

### B.1. Pendapatan

Pendapatan  
Negara dan  
Hibah sebesar  
Rp. 526.340

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 526.340,- yang terdiri dari : Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 526.340 berupa setoran kelebihan kekurangan gaji pengabdian atas nama Suwanto sesuai dengan kode billing 820230103781376, NTPN: FDA1861QUQ89UK00 tanggal 04 Januari 2023.

**Tabel 5**  
**Rincian Pendapatan per 31 Desember 2023**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>0</b>	<b>526,340</b>	<b>-</b>
Pendapatan dari Pemindahtanganan BM	0	-	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA YL		526,340	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	-	-
<b>Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>526,340</b>	<b>-</b>

### B.2. Belanja

Realisasi Belanja  
sebesar  
Rp. 53.998.342.065

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 53.998.342.065 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp 55.835.687.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Rincian Belanja per 31 Desember 2023**  
**(dalam rupiah)**

Jenis Belanja	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,162,877,000	2,152,640,456	99.53
Belanja Barang	53,432,652,000	51,615,556,609	96.60
Belanja Modal	240,158,000	230,145,000	95.83
<b>Jumlah</b>	<b>55,835,687,000</b>	<b>53,998,342,065</b>	<b>96.71</b>

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 1%. Hal ini disebabkan adanya tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Jombang sehingga anggaran KPU Kabupaten Jombang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran untuk pembiayaan tahapan Pemilu 2024.

**Tabel 7**  
**Perbandingan Realisasi TA 2023 dan TA 2022**  
**(dalam rupiah)**

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022
Belanja Pegawai	2,152,640,456	2,141,679,153
Belanja Barang	51,615,556,609	2,194,139,695
Belanja Modal	230,145,000	147,278,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>53,998,342,065</b>	<b>4,483,096,848</b>

Pada tahun 2023 terdapat belanja modal sebesar Rp. 230.145.000 yang terdiri dari belanja modal penambahan nilai bangunan dan peralatan dan mesin.

### B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai  
 sebesar  
 Rp. 2.152.640.456

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp. 2.152.640.456. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan. Hal ini

disebabkan karena adanya tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan dan adanya tambahan pegawai PPPK.

### B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 230.145.000

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2023 sebesar Rp 230.145.000,-

Yang terdiri dari pembelian belanja modal berupa penambahan nilai gedung dan bangunan senilai Rp. 96.670.000,- dan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 133.475.000

**Tabel 8**  
**Rincian Belanja Modal per 31 Desember 2023**

URAIAN	ANGGARAN (SETELAH REVISI)	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	96,670,000	96.67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140,158,000	133,475,000	95.23
Pengembalian Belanja		0	
<b>JUMLAH</b>		<b>230,145,000</b>	<b>-</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang sudah dipertanggungjawabkan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Rincian Kas Bendahara Pengeluaran**  
**Per 31 Desember 2023**

Keterangan	TH 2023
BRI cabang Jombang No.Rek 651896577221000	
Saldo per tanggal 31 Desember 2023	0
Belanja yang belum di GU kan	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>

### C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas

Kas Lainnya dan setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 terdapat kas lainnya dan setara kas sejumlah Rp. 24.954.012.060

### C.3. Belanja Dibayar di Muka

Belanja  
Dibayar di  
Muka

Saldo Belanja dibayar di muka per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

### C.4. Persediaan

Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.852.658.582,- yang merupakan persediaan barang logistic untuk kebutuhan Pemilu 2024.

### C.5. Aset Tetap

Aset Tetap  
Rp. 5.941.153.363

Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki

untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap pada KPU Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.941.153.363, terdiri dari :

1. Tanah : Rp. 3.027.072.000
2. Peralatan dan Mesin : Rp. 3.146.188.676
3. Gedung dan Bangunan : Rp. 2.788.819.000
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 55.278.000

- Tanah pada KPU Kabupaten Jombang seluas 3646 m2 sesuai Sertifikat Tanah dari BPN RI Nomor 12.12.19.07.4.00002 yang telah diserahkan ke KPU RI dengan nilai perolehan sebesar Rp. 3.027.072.000.
- Peralatan dan Mesin pada KPU Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.146.188.676,-
- Gedung dan Bangunan pada KPU Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.788.819.000
- Jalan, Irigasi dan Jaringan pada KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023 yakni sebesar Rp. 55.278.000 yang merupakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

#### **C.6. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp. 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0.

#### **C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (3.076.204.313). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

### **C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (302.427.950). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

### **C.9. Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka  
dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### **C.10. Kewajiban**

Kewajiban  
Rp. 0

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 pada KPU Kabupaten Jombang yaitu sebesar Rp. 0 yang terdiri sari Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp0, utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0, dan uang muka dari KPPN sebesar Rp. 0,-

### **C.11. Ekuitas**

Ekuitas  
Rp.  
32,747,824,005

Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 32.747.824.005. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan pajak**

Pendapatan  
Penerimaan  
Negara Bukan  
Pajak

Jumlah Pendapatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 0.

### **D.2. Beban Pegawai**

Beban  
Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.110.634.906,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi,

baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Anggota KPU Kabupaten Jombang berikut Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tenaga kontrak.

**Tabel 10**  
**Rincian Beban Pegawai**  
**Per 31 Desember 2023**

RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023		
Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	518,858,400
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,147
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-422
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	39,581,940
511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,024,302
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	54,900,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,538,951
511126	Beban Tunj. Beras PNS	27,229,920
511129	Beban Uang Makan PNS	69,067,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,310,000
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,407,500
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	10,588,800
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	88
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	289,680
511628	Beban Uang Makan PPPK	2,520,000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	548,102,600
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	10,808,000

### D.3. Beban Persediaan

Beban  
 Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 770.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

**Tabel 11**  
**Rincian Beban Persediaan**  
**Per 31 Desember 2023**

RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023		
Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	770,000

**Beban Barang dan Jasa**

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 48.615.918.766. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

**Tabel 12**  
**Realisasi Beban Barang dan Jasa**  
**Per 31 Desember 2023**

RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023		
<i>calc_lo_akun_satker--rekon17</i>		
Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	36,275,913
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	150,300,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,278,770
521211	Beban Bahan	2,755,608,156
521213	Beban Honor Output Kegiatan	37,059,530,000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,636,989,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	49,656,000
522111	Beban Langganan Listrik	25,542,838
522112	Beban Langganan Telepon	1,353,293
522141	Beban Sewa	727,529,600
522151	Beban Jasa Profesi	6,300,000
522191	Beban Jasa Lainnya	158,555,196

**Beban Pemeliharaan**

**D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2023 sebesar Rp 545.423.902.- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Rincian Beban Pemeliharaan**  
**Per 31 Desember 2023**

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023		
<i>calc_lo_akun_satker--rekon17</i>		
Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	278,445,850
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266,978,052

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan  
Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.547.406.471,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**per 31 Desember 2023**

RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023		
Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Biasa	1,106,144,607
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,676,000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	300,828,166
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	65,757,698

#### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang  
untuk Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp 0,-

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp 264.160.505. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

**Tabel 15**  
**Rincian Beban Penyusutan**  
**per 31 Desember 2023**

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023		
Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	201,243,001
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61,535,554
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,381,950

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

#### Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.747.824.005.- Maka ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 5.936.657.138.-, sedangkan Transaksi antar entitas sebesar Rp 79.898.448.897.- dan, Kenaikan/ penurunan ekuitas sebesar Rp 26.811.166.867.-. Rincian untuk Perubahan Ekuitas pada Triwulan III tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Perbandingan Ekuitas TA 2022 dan TA 2023**

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	5,936,657,138	6,802,859,518
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(53,083,788,210)	(4,895,512,241)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3,493,820)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(3,493,820)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(3,493,820)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	79,898,448,897	4,029,309,861
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		26,811,166,867	(866,202,380)
EKUITAS AKHIR	E.5	32,747,824,005	5,936,657,138

### E.2. Surplus (Defisit) LO

#### Surplus (deficit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp 53.083.788.210).

### E.3. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

#### Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Terdapat koreksi terhadap Penyesuaian Nilai Aset (Penyesuaian Nilai Persediaan), Koreksi Nilai Persediaan Rp 0, dan Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp 0.- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yaitu sebesar Rp (3.493.820)

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

##### Transaksi Antar Entitas

Terdapat Transaksi Antar Entitas berupa ditagihkan ke Entitas lain yaitu sebesar Rp. 79.898.448.897.- pada Semester II TA 2023.

#### E.5. Ekuitas Akhir

##### Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.747.824.005.-

### F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

#### F.1. Pengelola Keuangan

##### Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 05/HK.03.01-Kpt/3517/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran serta Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum 2023.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Hanif Purwanto, Ap., S.Sos
Pejabat Pembuat Komitmen	: Heri Subagyo, SE., Msi
Pejabat Penandatangan SPM	: Samsul Hudha, SE
Bendahara Pengeluaran	: Ermawati Puspita Sari
Staf Pengelola Keuangan	: 1. Dwi Ratna Anjar Sakti, SE 2. Affrianto Syahputra, SH

Namun pada bulan Oktober 2023 ada mutasi pegawai sehingga ada perubahan SK pengelola keuangan sebagaimana Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jombang Nomor : 18 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran serta Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2023 dengan susunan :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Mochamad Arifuddin
Pejabat Pembuat Komitmen	: Heri Subagyo, SE., Msi

Pejabat Penandatanganan SPM : Samsul Hudha, SE  
Bendahara Pengeluaran : Ermawati Puspita Sari  
Staf Pengelola Keuangan : 1. Dwi Ratna Anjar Sakti, SE  
2. Imam Faizin

### **F.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

PNBP

Terdapat pengembalian belanja yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp. 526.340 yang merupakan pengembalian atas kelebihan pengajuan kekurangan gaji pangkat pengabdian almarhum Suwarto PNS Organik KPU Kabupaten Jombang yang meninggal pada tanggal 06 Mei 2022.

### **F.3. Persediaan**

Terdapat dengan barang persediaan keperluan Pantarlihunutk Pemilihan Umum di Kabupaten Jombang tidak terdapat sisa persediaan sehubungan dengan adanya restrukturisasi/ pengurangan jumlah TPS dari jumlah semula 4.295 TPS menjadi 3.858 TPS. Hal ini disebabkan telah diadakan adendum kontrak/Surat Pesanan Nomor 14/SP/3517/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas kontrak/ Surat Pesanan Nomor : 5/SP/3517/2023 tanggal 23 Januari 2023 untuk paket pekerjaan ID Card pantarlih, rompi dan topi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Jombang.



# LAMPIRAN 1

## NERACA PER 31 DESEMBER 2023

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 657722 ) KPU KABUPATEN JOMBANG**

Tgl Data : 14/02/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 14/02/24 12:42 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	24,954,012,060	0	24,954,012,060	0.00
Persediaan	1,852,658,582	0	1,852,658,582	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>26,806,670,642</b>	<b>0</b>	<b>26,806,670,642</b>	
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,027,072,000	3,027,072,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,146,188,676	3,012,713,676	133,475,000	4.43
Gedung dan Bangunan	2,788,819,000	2,692,149,000	96,670,000	3.59
Jalan, Irigasi dan Jaringan	55,278,000	55,278,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,076,204,313)	(2,808,549,988)	(267,654,325)	9.53
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5,941,153,363</b>	<b>5,978,662,688</b>	<b>(37,509,325)</b>	<b>(0.63)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	302,427,950	302,427,950	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(302,427,950)	(302,427,950)	0	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>32,747,824,005</b>	<b>5,978,662,688</b>	<b>26,769,161,317</b>	<b>447.74</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	42,005,550	(42,005,550)	(100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0</b>	<b>42,005,550</b>	<b>(42,005,550)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>42,005,550</b>	<b>(42,005,550)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	32,747,824,005	5,936,657,138	26,811,166,867	451.62
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>32,747,824,005</b>	<b>5,936,657,138</b>	<b>26,811,166,867</b>	<b>451.62</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>32,747,824,005</b>	<b>5,936,657,138</b>	<b>26,811,166,867</b>	<b>451.62</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>32,747,824,005</b>	<b>5,978,662,688</b>	<b>26,769,161,317</b>	<b>447.74</b>

Keterangan :  
FINAL

JOMBANG, 14 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

MOCHAMAD ARIFUDDIN  
198112132000121001



# **LAMPIRAN 2**

## **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **PER 31 DESEMBER 2023**

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : ( 657722 ) KPU KABUPATEN JOMBANG

Tgl Data : 14/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 14/02/24 12:43 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,936,657,138	6,802,859,518	(866,202,380)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(53,083,788,210)	(4,895,512,241)	(48,188,275,969)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,493,820)	0	(3,493,820)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(3,493,820)	0	(3,493,820)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	79,898,448,897	4,029,309,861	75,869,139,036	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	26,811,166,867	(866,202,380)	27,677,369,247	-
EKUITAS AKHIR	32,747,824,005	5,936,657,138	26,811,166,867	-

Keterangan :

FINAL

JOMBANG, 14 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

MOCHAMAD ARIFUDDIN

198112132000121001



# **LAMPIRAN 3**

## **LAPORAN OPERASIONAL**

### **PER 31 DESEMBER 2023**

## LAPORAN OPERASIONAL

**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 657722 ) KPU KABUPATEN JOMBANG**

Tgl Data : 14/02/24 12:30 PM

Tgl Cetak : 14/02/24 2:13 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,110,634,906	2,183,684,703	(73,049,797)	(3.345)
Beban Persediaan	770,000	0	770,000	
Beban Barang dan Jasa	48,615,918,766	930,138,171	47,685,780,595	5,126.742
Beban Pemeliharaan	545,423,902	452,299,184	93,124,718	20.589
Beban Perjalanan Dinas	1,547,406,471	811,702,340	735,704,131	90.637
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 657722 ) KPU KABUPATEN JOMBANG**

Tgl Data : 14/02/24 12:30 PM  
Tgl Cetak : 14/02/24 2:13 PM  
Halaman : 2  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	264,160,505	335,459,786	(71,299,281)	(21.254)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>53,084,314,550</b>	<b>4,713,284,184</b>	<b>48,371,030,366</b>	<b>1,026.27</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(53,084,314,550)</b>	<b>(4,713,284,184)</b>	<b>(48,371,030,366)</b>	<b>1,026.27</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	453,786,987	(453,786,987)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	453,786,987	(453,786,987)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	526,340	(636,015,044)	636,541,384	(100.083)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	526,340	0	526,340	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	636,015,044	(636,015,044)	(100)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>526,340</b>	<b>(182,228,057)</b>	<b>182,754,397</b>	<b>(100.289)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(53,083,788,210)</b>	<b>(4,895,512,241)</b>	<b>(48,188,275,969)</b>	<b>984.336</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(53,083,788,210)</b>	<b>(4,895,512,241)</b>	<b>(48,188,275,969)</b>	<b>984.336</b>

---

Keterangan :

FINAL

JOMBANG, 14 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

MOCHAMAD ARIFUDDIN

198112132000121001



# **LAMPIRAN 4**

## **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **PER 31 DESEMBER 2023**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076  
**ESELON I** : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01  
**SATUAN KERJA** : KPU KABUPATEN JOMBANG 657722

Tgl Data : 14/02/24 6:25 AM  
Tgl Cetak : 14/02/24 12:41 PM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>55,835,687,000</b>	<b>53,998,342,065</b>	<b>(1,837,344,935)</b>	<b>97</b>	<b>4,572,513,000</b>	<b>4,483,096,848</b>	<b>(89,416,152)</b>	<b>98</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JOMBANG, 14 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

MOCHAMAD ARIFUDDIN  
198112132000121001